PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Sabtu Tanggal: 01 April 2017 Halaman: 13

BPKAD Tarik 800 Lembar SPPT PBB di Gondokusuman

YOGYA, TRIBUN - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya menyatakan adanya kesalahan dalam proses penentuan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kecamatan Gondokusuman. Atas hal tersebut, pihaknya menarik 800 lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB Kota Yogya 2017.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya, Kadri Renggono menjelaskan, pihaknya belum memasukkan komponen bangunan pada 800 lembar SPPT untuk Kecamatan Gondokusuman. Selama ini, ada dua komponen utama yang menjadi penentu besaran PBB, yakni luasan tanah dan bangunan.

"Karena belum memasukkan komponen bangunan, sehingga berdampak pada SPPT tidak faktual. Kami terpaksa menarik kembali sekitar 800 SPPT ini," jelasnya.

Pihaknya mengatakan, sebelumnya melakukan pencermatan pada sistem penghitungan PBB sesuai dengan rumus yang ada. Pascapenarikan, pihaknya akan melakukan proses revisi.

Hanya, proses penyelesaiannya masih belum dapat dipastikan.

● ke halaman 14

BPKAD Tarik

● Sambungan Hal 13

BPKAD hingga kini juga belum bisa menjadwalkan distribusi ulang SPPT PBB di Gondokusuman. Meski demikian, begitu proses selesai, pihaknya akan segera mendistribusikan kembali SPPT revisi ke kecamatan tersebut.

Disinggung keterlambatan warga Gondokusuman menerima SPPT PBB 2017, pihaknya menegaskan, jatuh tempo pembayaran tetap tidak berubah, yakni 30 September. Akan tetapi, pengajuan keberatan atau permohonan pembetulan, tetap diberikan tenggat waktu maksimal tiga bulan sejak diterimanya SPPT PBB oleh wajib pajak.

Perlu diketahui, total SPPT PBB 2017 yang diterbitkan Pemkot mencapai 93.430 lembar. Sedangkan total ketetapannya mencapai Rp79,52 miliar. Hanya, target yang ditentukan masih di bawah ketetapan, yakni Rp57,8 miliar.

"Penetapan target itu sudah mempertimbangkan realisasi tahun lalu, yakni dari target Rp53 miliar, terealisasi Rp56,4 miliar," ujarnya.

Dia menyebutkan, besaran PBB yang harus dibayarkan oleh wajib pajak mulai tahun ini bakal mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Hal ini lantaran ada kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga enam kelas. Di samping itu, stimulan atau potongan yang diberikan Pemkot juga berkurang.

Sebelumnya, kata dia, nilai aset tanah dan bangunan diberikan potongan. Akan tetapi, untuk tahun ini hanya tanahnya saja yang diberikan stimulan hingga 35 persen. Sementara, nilai pajak bangunan tetap mengacu ketetapan.

Cek data

Camat Gondokusuman, Jalaludin, mengatakan, pihaknya belum mendapatkan informasi adanya 800 SPPT yang akan ditarik oleh Pemkot setempat. Hal ini lantaran distribusi SPPT dilaksanakan di kelurahan. Pihaknya pun akan segera mengecek data tersebut.

"Kemungkinan ada kesalahan penulisan karena ada pemutakhiran data di empat kecamatan, Gondokusuman salah satunya. Pemutakhiran ini adalah pembetulan basis data dan tampaknya kurang sukses," jelasnya.

Dia menjelaskan, meski penerimaan SPPT terlambat di tangan warga, namun itu tidak berdampak pada pembayaran. Hanya saja, untuk warga yang akan mengurus tanah, akan menjadi persoalan tersendiri karena wajib melampirkan SPPT PBB terakhir. **(ais)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005